

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu atau Pemilihan umum pada dasarnya merupakan suatu mekanisme untuk memilih calon calon pemimpin dan legislatif dalam tata cara pemerintahan yang demokratis. Pengertian lain pemilu menurut A Ubadilah dan Abdul Razaq (2014:82), adalah suatu mekanisme untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman. Pemilu pada prinsipnya adalah sebuah *political will* untuk mencapai keadilan dan kebebasan manusia sebagai masyarakat sipil.

Sebagai mekanisme pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi, maka dalam pemilu adanya unsur partai politik merupakan sebuah keharusan. Dari partai inilah kader kader bakal calon eksekutif dan legislatif lahir. Partai juga berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat atau dengan kata lain partai memiliki peran sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Peran krusial partai inilah yang memang sudah seharusnya menjadi tujuan eksistensi partai itu sendiri.

Menurut Prof Mirian Budiardjo (2008:405), partai politik dalam menjalankan fungsinya tergantung system politik suatu Negara yang bersangkutan. Di Negara yang menganut system pemerintahan demokrasi, maka fungsi partai adalah menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan rakyat dihadapan penguasa. Oleh sebab itu, maka beliau menyatakan, bahwa fungsi partai politik di negara dengan pemerintahan demokrasi salah satunya adalah sebagai sarana sosialisasi politik atau sarana pendidikan politik warga Negara.

Indonesia sendiri adalah negara yang menganut system pemerintahan demokrasi. Ada berbagai macam partai dengan *platform* dan orientasi nilai serta tujuannya masing-masing. Ada partai dengan orientasi nilai-nilai ke-Islaman seperti Masyumi era Orde lama, PKS era reformasi, PKB, dan lain sebagainya. lahirnya partai-partai berasaskan Islam menurut Zuly Qodir (2012:200) adalah karena pengingkaran format baru logika Islam politik Indonesia pasca rezim Orde Baru tumbang; dari substansialis menuju formalisasi Islam. Di era milenial seperti saat ini juga muncul partai dengan basis para pemuda sebagai kadernya seperti PSI. partai dengan ideology komunis pun pernah tumbuh di bumi Indonesia yaitu PKI di era Orde Lama.

Dari banyaknya partai yang ada sejak era kemerdekaan sampai era reformasi saat ini, pertanyaan terpenting adalah bukan apa *platform* dari partai

politik tertentu, tetapi pertanyaan yang lebih esensial dalam tinjauan sosiologis adalah bagaimana fungsi partai politik itu dijalankan? Dengan sarana apa dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Untuk mengukur peran dan fungsi Parpol sebagai salah satu sarana pendidikan politik, maka bisa dilihat dari kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Orientasi memilih dan budaya politik sekurang-kurangnya bisa tercermin dari kehadiran dan ketidakhadiran masyarakat pada saat pemilu dilakukan.

Pemilu yang umumnya dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia juga tentunya mencakup desa sebagai keseluruhan wilayah NKRI. Sebagaimana diketahui, bahwa pada umumnya, masyarakat desa dicirikan dengan karakteristik tradisional, dimana masyarakatnya menjunjung tinggi adat dan tradisi yang ada. Menurut Paulus Wirutomo mengutip Robert Redfield (2012:232), ciri masyarakat desa yaitu tradisional, mata pencaharian umumnya bekerja di sektor pertanian, cara hidupnya yang sederhana, berorientasi pada nilai dan adat komunal. Pemilu sebagai sebuah mekanisme pemerintahan di abad modern, bagi masyarakat desa tentu merupakan sesuatu yang asing yang tidak ada aturan adat atau nilai tradisi yang mengaturnya.

Kendati saat ini teknologisasi dan modernisasi kehidupan telah dapat diterima masyarakat desa seperti maraknya penggunaan televisi sebagai ruang hiburan sekaligus pendidikan, namun hal itu tidak bisa menjamin perubahan orientasi nilai nilai yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat desa.

suatu pemahaman atas realitas tentunya membutuhkan ruang dialektis yang memungkinkan pertukaran informasi dengan dua atau lebih subjek yang sadar. Kesadaran akan ketidaktahuan inilah yang memungkinkan manusia untuk memberi jarak sekaligus memberi makna terhadap lingkungan dirinya. Tepat seperti yang dikatakan oleh Freire bahwa manusia dapat hidup bersama dengan dunia karena dia dapat menjaga jarak dengannya secara objektif. Tanpa objektifikasi seperti ini, termasuk mengobjektifikasi dirinya, manusia hanya dapat di dunia tanpa pengetahuan tentang dirinya dan dunia. (Paulo Freire, 2007: 123).

Freire sesungguhnya bermaksud untuk mencari jalan keluar pembebasan manusia dalam kehidupan sosial yang menindas. Di dalam konteks pemilu, fenomena memperlihatkan bahwa sistem demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai mekanisme pergantian pemerintah justru saat ini dijadikan sebagai tempat transaksi kekuasaan antara elit politik dan elit masyarakat desa. Ketidaktahuan masyarakat akan hal ini pada akhirnya hanya menjadikan demokrasi sebagai suatu sistem yang anarki. Suara rakyat satu-satunya jalan untuk memuaskan syahwat berkuasa. Maka untuk berkuasa, berbagai cara akan dilakukan demi kepentingan sesaat. Watak politikus memang seperti yang pernah dipaparkan oleh JJ.Rouesseu dalam Henry J. Schmandt (2015: 391), bahwa keadaan alamiah manusia yang damai akhirnya menjadi mencekam setelah para individu menyerahkan hak alamiahnya dan masuk ke dalam

masyarakat sipil. Keadaan perang yang dikemukakan oleh Hobbes muncul kembali, tetapi ia bukanlah keadaan alamiah, sekarang ia ada dan terjadi dalam negara sipil.

Pemilu sebagai pendidikan politik rakyat dengan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum sebagai sarananya, dewasa ini belum secara maksimal mencapai target dan arah perubahan masyarakat yang demokratis. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah karena kedepannya, pemilu akan terus mengalami kecacatan nilai dan moralitasnya. Oleh sebab itu Sanit dalam Nanang Martono (2014: 356), menyatakan bahwa ada dua upaya politik yang diperlukan untuk menyiapkan bangsa Indonesia memasuki abad ke-21, yaitu *reorientasi* dan *rekonstruksi* budaya politik.

Kasus kasus seperti politik uang (*money politics*), pelanggaran APK (alat peraga kampanye), kampanye hitam (*black campaign*), golput, merupakan deretan masalah yang melibatkan masyarakat secara langsung. salah satu media saja memberitakan bahwa dari hasil survey Pemilu pada tahun 2014, tercatat ada 3.318 atau 23 persen pemberitaan yang memuat kasus pelanggaran pemilu yang umunya didominasi *money politic*. (detik.com 11 Mei 2014). Pelanggaran tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Artinya, bahwa hingga saat ini masyarakat belum secara utuh memahami arti penting pemilu.

Keadaan yang sama juga terjadi di tempat peneliti melakukan penelitian yaitu desa Bojonegara, kecamatan Tambak Dahan, kabupaten Subang. Desa

tersebut merupakan desa peneliti sendiri. Dari hasil pengamatan sementara yang telah dilakukan, ada banyak persepsi atau pandangan tentang bagaimana masyarakat memaknai arti penting pemilu sebagai proses pendidikan politik rakyat. Misalnya orientasi nilai memilih hanya karena ikut-ikutan, disuap dari “serangan pajar”, kewajiban moral, dan sebagainya.

Fenomena-fenomena tersebut merupakan fakta yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar individu yang hidup dalam satu kesatuan masyarakat dan kebudayaan yang sama. Dunia intersubjektif yang mengikat antar personal diantara manusia dengan berbagai kepentingan yang berbeda, menjadikan orang-orang tidak melakukan tindakan serupa pada objek dan stimulus yang ada. Pemilu sebagai sebuah mekanisme dari system demokrasi adalah medium pendidikan politik rakyat. Namun, konsep pendidikan yang sejatinya membebaskan dan memanusiakan pada akhirnya hanya menenggelamkan kesadaran individu dalam euphoria pemilu yang cacat moral. Masalah timbul ketika disatu sisi ada harapan agar bangsa Indonesia menjadi lebih demokratis dengan adanya pemilu. Namun di sisi lain, asas asas seperti kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), keadilan (*justice*) dalam demokrasi justru dimanipulasi oleh kelompok dominan yang menjadikan masyarakat desa yang subordinat berada pada kubangan budaya bisu (*silent culture*).

Alasan peneliti melakukan penelitian di desa sendiri adalah karena faktor urgensi masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Desa Bojonegara

sendiri merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Subang. Seperti diketahui, kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah yang secara tata kelola pemerintahan terbilang sangat buruk. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan di televisi yang acap kali memberitakan kasus kasus koruptif para bupati di kabupaten Subang. Kasus korupsi yang menyeret pemimpin atau bupati Subang sendiri bukan hanya terjadi satu atau dua kali. Parahnya, korupsi terjadi sampai tiga kali berturut-turut terhitung dari saat bupati Eep Hidayat menjabat. Kemudian disusul korupsi yang menyeret bupati selanjutnya yaitu Ojang Sohandi. dan yang teranyar, korupsi kembali dilakukan oleh bupati pengganti Imas Aryumningsih yang belum lama ini kasusnya terkuak KPK.

Selain itu, pelanggaran yang biasa terjadi dalam pemilu adalah pemasangan APK (alat peraga kampanye) di sembarang tempat dan di sembarang waktu. Kurangnya sosialisasi partai politik kemungkinan merupakan faktor yang menjadi sebab ketidaktahuan masyarakat tentang aturan kampanye. Televisi sebagai ruang public (*public sphere*) saat ini justru acap kali menayangkan tayangan tayangan yang kurang mendidik. Informasi yang mendidik tidak sebanding dengan tayangan dengan info info yang kurang bermanfaat seperti acara acara gosip yang kaya isu dan miskin fakta.

Dari masalah masalah yang sudah dipaparkan di atas, pada dasarnya penelitian ini ingin mencari tahu makna pemilu itu sendiri menurut masyarakat desa. Pembentukan makna dalam diri individu tentunya dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang ada. Beragam makna yang ada di dalam pikiran (*nghomenom*) masyarakat tentunya memiliki pengaruh pada saat melakukan proses memilih calon legislatif atau eksekutif. Berangkat dari masalah masalah tersebut, maka penelitian ini mengangkat tema sosiologi politik yang berjudul **“MAKNA PEMILU SEBAGAI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DESA (studi kasus masyarakat desa Bojonegara kecamatan Tambak dahan kabupaten Subang)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil sebuah identifikasi masalah, tujuan dari identifikasi masalah dalam skripsi ialah untuk memberikan batasan dalam menjelaskan masalah yang diteliti sehingga pembahasan tidak melebar. Adapun masalah yang diidentifikasi yaitu:

1. Persepsi masyarakat Desa Bojonegara tentang pemilu. Sebagai Pendidikan Politik?
2. Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa Bojonegara tentang pemilu.
3. Orientasi nilai masyarakat desa Bojonegara dalam memilih calon pada pemilu sebagai pendidikan politik rakyat.
4. Dampak pemilu sebagai pendidikan politik terhadap masyarakat Desa Bojonegara.



### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah teridentifikasi di atas, maka selanjutnya dilakukan perumusan masalah berupa butir butir pertanyaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencari data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Masyarakat desa Bojonegara tentang pemilu sebagai pendidikan politik?
2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa Bojonegara mengenai Pemilu?
3. Bagaimana orientasi nilai-nilai memilih masyarakat desa Bojonegara dalam pemilu?
4. Bagaimana dampak Pemilu sebagai ruang pendidikan politik terhadap masyarakat Desa Bojonegara?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari masalah yang sudah dirumuskan tersebut, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang pemilu sebagai pendidikan politik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat desa Bojonegara mengenai pemilu.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis orientasi nilai-nilai sosial masyarakat desa Bojonegara dalam pemilihan umum (pemilu).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemilu terhadap masyarakat Desa Bojonegara.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik pada tataran praktis maupun bermanfaat pada tataran akademis atau teoritis.

#### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan dalam usaha membangun budaya politik masyarakat yang baik dan demokratis melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kegunaan lain dari penelitian ini secara praktis nantinya bisa juga dijadikan sebagai penambah khazanah pengetahuan masyarakat dalam usaha mengkonstruksi kesadaran berpolitik yang baik menurut prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu.

#### **1.5.2. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian pada tataran teoritis atau akademis ini diharapkan hasil penelitiannya dapat menjadi penambah khazanah pengetahuan ilmu sosial.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori aksi (*action theory*) yang mengikuti pemikiran Weber. Teori ini merupakan teori yang termasuk dalam ruang lingkup paradigma definisi sosial (*social definition*). Para teoritis dalam paradigme ini menyatakan bahwa sosiologi tidak saja harus mempelajari masyarakat sebagai sebuah keseluruhan system yang mempengaruhi individu-individu di dalamnya. Weber percaya bahwa sosiologi adalah ilmu untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial yang ia maksud sebagai tindakan yang “*penuh arti*”. Arti dari pernyataan Weber adalah, bahwa tindakan individu dalam masyarakat merupakan tindakan yang subjektif dan penuh makna. Konsusekuensi dari pernyataan ini adalah, bahwa pradigme definisi sosial yang memandang individu sebagai actor yang aktif dengan tindakan subjektif yang penuh makna bertentangan secara langsung dengan pandangan para teoritis fakta sosial seperti Emile Durkheim yang menyatakan bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat yang mana tindakan-tindakannya sangat dipengaruhi oleh system sosial dan system budaya dimana individu itu hidup.

Salah satu asumsi fundamental teori aksi menurut George Ritzer mengutip Hinkle (2014:46), adalah bahwa individu dan tindakannya muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Hal ini memiliki gambaran bahwa tindakan individu

pada dasarnya adalah tindakan sadar yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya tindakan spontanitas, instingtif, dan realsioner dari pengaruh system secara keseluruhan. Parson walaupun lebih dikenal sebagai teoritis fakta sosial dengan structural fungsionalnya, di sisi lain ia menaruh perhatian pada mikrosiologi individu sebagai actor sosial. Parson menyatakan dalam George Ritzer (2014:49) bahwa actor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma norma ini tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan actor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parson sebagai: *voluntarism*.

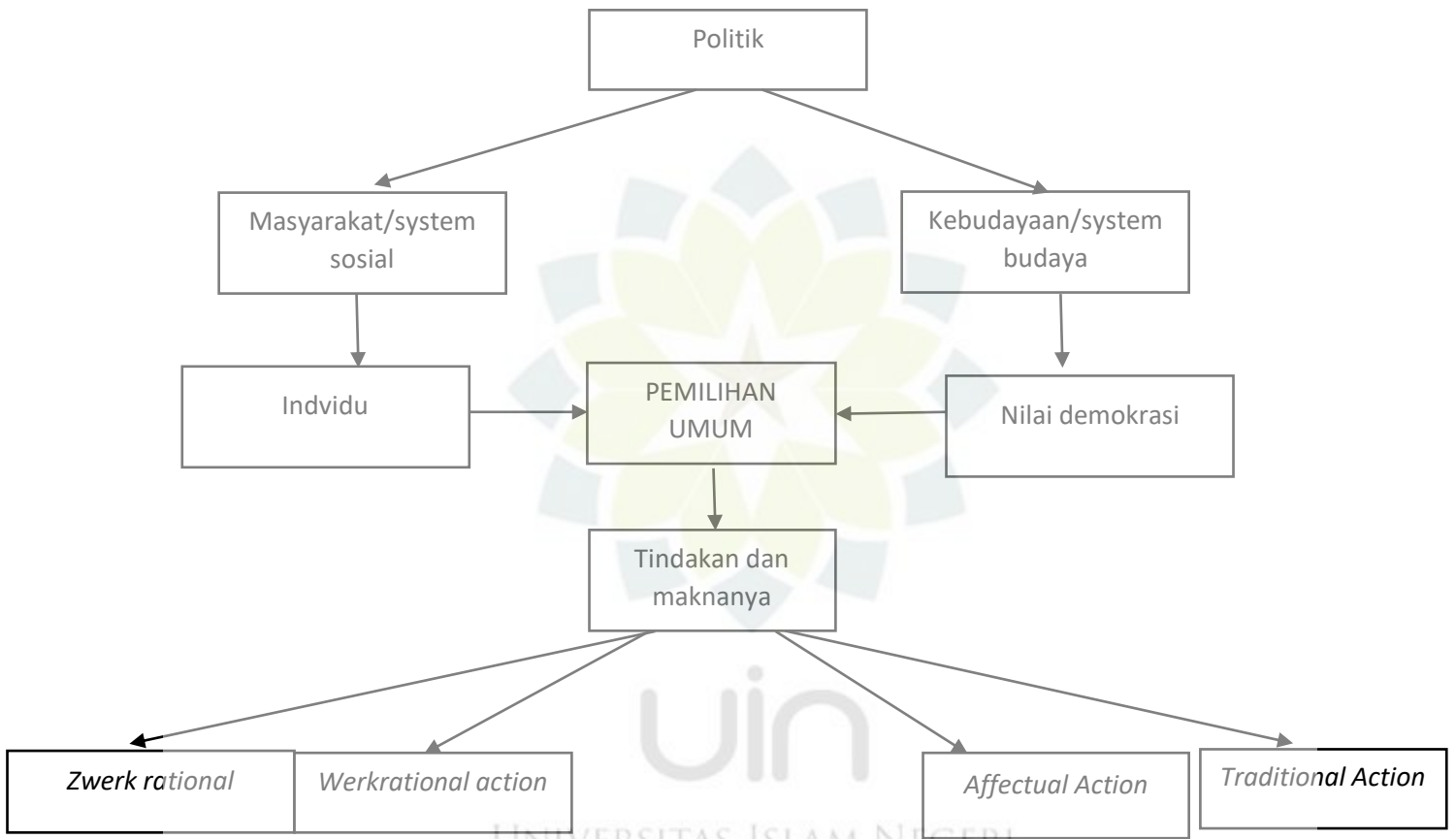
Dalam teori tindakan Weber, kemampuan actor untuk memilih alternatif tindakan ini adalah sebuah bentuk rasionalitas dari tipe tipe tindakan yang ia klasifikasikan dalam beberapa bentuk. Tipe tipe rasionalitas dalam tindakan manusia kemudian menjadi bukti bahwa tindakan manusia tidak hanya direduksi sebagai hasil dari pengaruh system sosial dan system budaya. Sistem sosial sebagai sebuah kesatuan sub-subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain serta memiliki tujuan pada dasarnya hanya menetapkan norma dan nilai untuk mencapai suatu tujuan tanpa menetapkan alat apa saja sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebudayaan atau system budaya sama halnya dengan system sosial. Hubungan antara system sosial dan system budaya sebenarnya merupakan

suatu hubungan dialektis yang memungkinkan masyarakat sebagai kesatuan sosial selalu memproduksi budaya secara continue di setiap tempat dan zaman. Adapun, system budaya sebagai hasil cipta, karsa, dan karya manusia sebaliknya selalu mempengaruhi masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai pemberi makna dan tujuan hidup masyarakat. namun seiring waktu, walaupun sifat kebudayaan tidak mudah berubah, namun kenyataannya perubahan kebudayaan selalu mengikuti arah perubahan masyarakat dengan nilai-nilai barunya.

Dari latar teori ini, maka penelitian ini bermaksud mencari data yang bukan sekedar data, tetapi mencari makna dari tindakan tindakan actor dalam hubungannya dengan pemilu sebagai sebuah system nilai demokrasi yang bisa disebut sebagai kebudayaan. Berikut ini digambarkan skema konseptual dari kerangka pemikiran penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG



Gambar 1.1. Skema Konsep Kerangka Pemikiran